

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BONE**

Diajukan Oleh

Eka Putri Wulandari

4517013065



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Eka Putri Wulandari

Nomor Stambuk : 4517013065

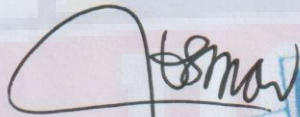
Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak, CA



Adif Setiawan, A.md. Kom., SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

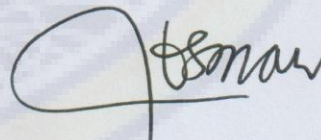
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. H. A. Arifuddin Manne, S.E., M.Si., S.H., M.H



Dr. Firman Manne, S.E., M.Si., Ak, CA

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORISINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Putri Wulandari
Nim : 4515013065
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul : Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 27 Juni 2021

Mahasiswa yang bersangkutan



(Eka Putri Wulandari)

**THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES CAPACITY AND THE APPLICATION
OF REGIONAL FINANCIAL ADMINISTRATIVE INFORMATION SYSTEMS TO
QUALITY OF FINANCIAL REPORTS ON THE REGIONAL FINANCIAL AND
ASSETS MANAGEMENT AGENCY OF BONE REGENCY**

By :

EKA PUTRI WULANDARI

*Accounting Program Faculty of Economics
University of Bosowa*

ABSTRACT

This study aims to examine the capacity of human resources and the application of regional financial administration information systems to the quality of financial reports at BPKAD Bone district. The object of this research is the employees of BPKAD Bone district in the fields of accounting, budgeting, and treasury.

The sample method used is the proportionate stratified random technique, which is taking samples from each sub-population whose number is adjusted to the number of members of each sub-population with the characteristics determined to be selected as samples. The number of employees who were sampled in this study were 38 employees with the criteria of carrying out financial reporting and running a regional financial administration information system.

The data used is primary data in the form of questionnaires distributed to respondents. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis.

The results showed that the capacity of human resources and the application of the regional financial administration system had a significant effect on the quality of financial reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Bone Regency.

Keywords: *human resource capacity, regional financial administration information system, and quality of regional financial reports*

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE**

Oleh :

EKA PUTRI WULANDARI
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone. Objek penelitian ini adalah pegawai BPKAD kabupaten Bone pada bidang akuntansi, anggaran, dan perbendaharaan.

Metode sampel yang dilakukan dengan teknik *proportionate Stratified Random* yaitu mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara karakteristik yang ditentukan akan terpilih menjadi sampel. Jumlah pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 38 pegawai dengan kriteria melaksanakan pelaporan keuangan dan menjalankan sistem informasi administrasi keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem administrasi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

Kata Kunci : kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi administrasi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah menjadikan manusia sebagai kholifah dimuka bumi ini. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing dan mendidik umat manusia menuju jalan kebenaran. Berkat rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi mengenai “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone” . penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT, kepada seluruh dosen yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi tugas akhir ini.

Skripsi yang penulis buat ini merupakan salah satu persyaratan untuk kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Bosowa. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng , selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE.,M.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.
4. Ibu Indah Syamsuddin SE., M. Ak. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa.

5. Bapak Firman Menne.,SE.,M.Si.,Ak.,Ca selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa sekaligus sebagai pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Adil Setiawan, A.md. Kom.,SE.,M.Si., Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
7. Kepada bapak dan mama saya tercinta atas support doa dan segala materi yang telah diberikan selama kuliah di Universitas Bosowa
8. Kepada teman-teman saya selama kuliah di Universitas Bosowa khususnya akuntansi B yang selalu mengingatkan satu sama lain.
9. Kepada Organisasi Daerah Arung Palakka atas dukungan dan motivasi serta bantuan dalam penelitian saya.
10. Kepada teman bisnis bucket saya di daerah Dea ,wahyu, dede, dan fery atas kerjasama dan kegokilan kalian selama ini.
11. Kepada almeera.storeid terima kasih telah membantu secara materi sehingga bisa memenuhi biaya biaya di semester akhir.
12. Kepada Jenny, Jilo dan Jimy kucing kesayangan atas hiburan kalian dikala saya pusing mengerjakan skripsi dan jualan,
13. Kepada sobat kecil saya Girls dea, ainun, nisa, nadia, bira, amel dan nining atas segala drama drama yang diberikan.
14. Kepada sobat almeera uci, ila, nurul, alifza, dll atas liburan dan motivasi disaat jenuh kerja skripsi.

15. Kepada teman seperjuangan saya, riring atas pengorbanan tenaga dan waktunya tidak pernah berhenti kasih semangat sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang ilmu Akuntansi.

Makassar, 27 Juni 2021

Penulis,

Eka Putri Wulandari

BOSOWA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Definisi Akuntansi	8
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik	9
2.1.3 Laporan Keuangan	10
2.1.3.1 Kualitas Laporan Keuangan.....	12
2.1.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan.....	13
2.1.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	13
2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi	15
2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi	16
2.1.7 Aplikasi Siakuda.....	18
2.1.7.1 Pengawasan Aplikasi Siakuda.....	18
2.1.7.2 Fitur-Fitur Siakuda.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21

2.3 Kerangka Pikir	24
2.4 Hipotesis	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Daerah Penelitian	27
3.2 Metode Pengumpulan Data	27
3.3 Jenis Dan Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data.....	28
3.3.2 Sumber Data	29
3.4 Populasi Dan Sampel	29
3.4.1 Populasi	29
3.4.2 Sampel	30
3.5 Metode Analisis Data.....	31
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2 Uji Kualitas Data	32
3.5.2.1 Uji Validitas	32
3.5.2.2 Uji Realibilitas	33
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	33
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	33
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas	34
3.5.3.3 Uji Heterokedasitas	34
3.5.3.4 Uji Autokorelasi.....	35
3.5.4 Uji Hipotesis.....	36
3.5.4.1 Uji Simultan (Uji F)	36
3.5.4.2 Uji Parsial (Uji T)	36
3.5.5 Uji Koefisien Determinasi	36
3.6 Definisi Operasional	37
3.6.1 Variabel Independen	37
3.6.2 Variabel Dependen.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPKAD Kab. Bone	39
4.1.1 Sejarah BPKAD Kab. Bone	39

4.1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bone	49
4.1.3 Tugas Dan Fungsi BPKAD Kab. Bone	43
4.2 Deskripsi Data	57
4.3 Analisis Data	60
4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data	63
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	67
4.3.4 Hasil Uji Hipotesis	71
4.3.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi	76
4.4 Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIAKUDA pada BPKAD Kab. Bone.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bone	42
Gambar 4.2 Grafik Histogram Normalitas.....	66
Gambar 4.3 Grafik P-Plot Normalitas	67
Gambar 4.4 Grafik <i>Kolmogorv-Smirnov</i> Normalitas.....	68
Gambar 4.5 <i>Scatterplot</i> Heterokedasitas.....	70

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Syarat Uji Autokorelasi	35
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian	38
Tabel 4.1 Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner	57
Tabel 4.2 Persentase Penyebaran Dan Pengembalian Kuesioner	57
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan Dan Masa Kerja.....	58
Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	60
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah	61
Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Daerah.....	62
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	64
Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas.....	65
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.11 Perhitungan Regresi Berganda (Hasil Uji T).....	72
Tabel 4.12 Hasil Uji T	73
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	75
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan suatu negara umumnya berpedoman pada peraturan, baik itu aturan yang disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Di Indonesia, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Salah satu peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam mengatur sistem pemerintahan di Indonesia adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Salah satu peraturan pemerintah yang telah diperbaharui yaitu PP nomor 12 tahun 2019, dimana PP ini menggantikan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Pertimbangan penetapan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 293 dan pasal 330 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah, yang dimana artinya bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Terkait bentuk pertanggung jawaban yang disebutkan sebelumnya yaitu berupa laporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan di pemerintahan yaitu untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para penyedia dana dan pemakai lainnya, dalam membuat keputusan-keputusan rasional tentang alokasi dana ke organisasi tersebut. Laporan keuangan sangatlah penting dalam suatu instansi pemerintahan atau organisasi tertentu karena dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan suatu keberhasilan instansi tersebut. Laporan keuangan juga dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan instansi sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang handal dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, sebaiknya laporan keuangan yang dibuat harus berkualitas dan mudah dipahami sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Untuk dapat memenuhi karakteristik kualitatif tersebut, maka pengelolaan keuangan di pemerintah daerah tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang terpenuhinya karakteristik laporan keuangan yang kualitatif pada pemerintahan daerah diantaranya adalah kekurangan sumber daya manusia pengelola keuangan khususnya yang berlatar belakang akuntansi, penempatan sumber daya manusia yang keliru atau tidak sesuai dengan kemampuannya, kurangnya pemahaman sumber daya manusia mengenai administrasi, sarana dan prasarana. Maka dari itu pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan di daerah masih mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Widodo (2001) dalam Kharis (2010) mengemukakan bahwa “kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai”. Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan “sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”.

Peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan organisasi tidak dapat diabaikan begitu saja. Menurut Jeffrey Pfeffer dalam Sutrisno (2009) “sumber daya manusia merupakan sumber keunggulan daya saing yang mampu menghadapi berbagai tantangan.”

Selain memiliki pemahaman tentang administrasi pengelolaan keuangan, sumber daya manusia harus mampu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Pesatnya teknologi di era sekarang, menuntut sumber daya manusia untuk mampu menggunakan teknologi tersebut. Menurut Widjajanto (2001) dalam Sembiring (2013) “secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan”. Selain itu teknologi informasi dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan

desentralisasi. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten terbesar dan terluas yang berada di propinsi Sulawesi Selatan maka dari itu dalam pengelolaan keuangan daerah haruslah dikelola secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pemerintahan daerah, serta menunjang kinerja laporan keuangan daerah.

Pada penelitian A. Indah nurfadillah (2018) yang berjudul Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone, menyatakan bahwa “kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode penelitian (tahun 2014 sampai tahun 2016) dinilai kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja” selain itu di dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bone masih lebih memprioritaskan kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bone masih perlu dikelola lebih baik lagi dan lebih mengoptimalkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah Kabupaten Bone dengan sigap pada tahun 2017 membuat sistem informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu SIAKUDA atau Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan berada dalam pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. SIAKUDA adalah pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan adanya sistem administrasi keuangan yang baik, maka akan tercipta

suasana kerja yang lebih nyaman serta produktif. Hal ini juga akan mendorong terciptanya keuangan yang lebih tertata dan lebih baik bagi pemerintahan daerah.

Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) ini masih memiliki beberapa kendala. Jika dilihat pengelolaan aplikasi ini membutuhkan pemahaman dan kemahiran yang cukup dalam penggunaan teknologi, sedangkan yang terjadi sebagian besar SDM di BPKAD Kab. Bone belum paham, sehingga dalam penerapan aplikasi tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Aplikasi Sistem informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) ini memang memiliki banyak keunggulan diantaranya lebih efektif dalam mengelola pelaporan keuangan, keuangan yang lebih tertata, akuntabel, efisien, dan transparan. Tetapi dalam hal ini sistem tersebut juga cukup menyulitkan bagi penggunanya. Kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak dipergunakan dengan benar. Masalah-masalah yang ditemukan oleh pihak BPK dalam laporan keuangan pemerintah seperti ketidakpatuhan, ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Temuan penyimpangan administrasi dan kelemahan sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keandalan.

Berdasarkan hal tersebut ,maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai keterkaitan antara penerapan teknologi sistem

informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIAKUDA) dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone. Peneliti juga ingin mengetahui apakah penggunaan sistem ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan juga apakah kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Maka judul dari penelitian ini adalah:

“ Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIAKUDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah nya yaitu:

1. Apakah kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone ?
2. Apakah penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIAKUDA) memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) terhadap kualitas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terkhusus pada penerapan Aplikasi Sistem informasi Administrasi Keuangan Daerah.
2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait pelaporan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kemampuan peneliti untuk mengumpulkan berbagai macam teori maupun referensi secara sistematis untuk mendukung permasalahan penelitian. Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian.

2.1.1 Definisi Akuntansi

Ilmu akuntansi memiliki peran penting dalam entitas karena akuntansi dapat menjelaskan kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu. Mengenai definisi akuntansi Suparwoto (2019) dalam Dewi Novita (2020) mengemukakan bahwa:

“akuntansi adalah suatu teknik atau perangkat sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengelola aktivitas transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan atau instansi yang mampu menghasilkan informasi dari kegiatan dimana informasi tersebut membantu berbagai pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan.”

Pendapat berbeda juga dikemukakan oleh Surwadjono (2005) dalam Lauw Santy dan Sinta (2009) bahwa:

“akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori. Bidang praktek berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argument yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi.”

Dalam proses tahapannya, Bahri (2016) mengemukakan bahwa akuntansi adalah suatu seni pada suatu transaksi yang telah terjadi dengan cara mencatat, mengiktisar, menggolong dan pelaporan.

Dari beberapa definisi akuntansi menurut beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, akuntansi merupakan teknik dalam suatu transaksi pada suatu perusahaan/instansi yang berguna untuk mengukur dan mengelola aktivitas transaksi keuangan. Aktivitas tersebut dapat berupa kegiatan mengumpulkan, mencatat, menganalisis, mengklasifikasikan, meringkas hingga sampai pada aktivitas pelaporan transaksi suatu perusahaan/instansi dalam bentuk laporan informasi keuangan.

Tentunya dalam melaksanakan tahapan akuntansi sampai pada tahapan pelaporan pasti memiliki tujuan. Beberapa tujuan akuntansi menurut Pura (2013) yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai tolak ukur terhadap informasi yang dipercayai kebenarannya mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi.
- b. Sebagai sumber atas informasi yang terpercaya dalam perubahan dan perbandingan sumber ekonomi setelah terjadinya kegiatan usaha dari waktu ke waktu.
- c. Pembacaan terhadap informasi keuangan sebagai perkiraan atas posisi perusahaan.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Salah satu bidang akuntansi yang menjurus pada pengelolaan dana masyarakat adalah akuntansi sektor publik. Indra Bastian (2014) mengemukakan bahwa :

“Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”

Dari segi tahapannya, Abdul Hafiz (2006) dalam mengemukakan bahwa:

“akuntansi Sektor Publik atau Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, serta kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan termasuk laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah seturut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu mekanisme atau alat informasi akuntansi yang digunakan sebagai penyedia informasi pengelolaan dana masyarakat baik bagi pemerintah sebagai alat manajemen maupun bagi publik sebagai alat informasi.

Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).”

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan.

2.1.3 Laporan Keuangan

PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (revisi 2015) menyatakan “pelaporan keuangan adalah suatu sajian yang tersusun atas posisi keuangan dan kinerja keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu

yang menjadi informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.”

Menurut Bambang Riyanto (2012) dalam Wilna dkk (2018) mengatakan bahwa “laporan *Finansiil*(*Financial Statement*) yaitu memberikan ikhtisar atas keadaan suatu perusahaan, dimana neraca yang mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri, dan laporan rugi dan laba mencerminkan atas hasil yang telah dicapai selama periode tertentu.”

Manfaat pelaporan keuangan juga dikemukakan oleh Wilna dkk (2018) yang mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan dapat diterapkan dengan tujuan yaitu sebagai penyedia atas informasi yang berhubungan dengan posisi, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat sebagai pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Laporan keuangan juga disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran atas kemajuan dari pelaporan keuangan secara periodik dalam perusahaan. Pencatatan atas yang telah dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan diharuskan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku.”

Analisis laporan keuangan merupakan hasil akhir dari sebuah proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan dari posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuaangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Menurut PSAK 1 (2015) pernyataan ini tentang mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal atas isi laporan keuangan.

Kompenen laporan keuangan lengkap menurut PSAK 1 (2015) terdiri dari:

- a. Laporan atas posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
- c. Laporan atas perubahan ekiutas selama periode;

- d. Laporan atas arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan atas

2.1.3.1 Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa “laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Menurut Fahmi (2012) dalam Jamilah (2014) ”tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter.”

Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

2.1.3.2 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Untuk memenuhi laporan keuangan yang berkualitas maka laporan harus berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 tahun 2010, dengan indikator :

1. **Relevan**, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap. Informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. **Andal**, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. **Dapat dibandingkan**, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. **Dapat dipahami**, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.”

2.1.4 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia merupakan penggerak organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Menurut (Hullah, dkk. 2012) “Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya manusia yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya yang baik juga. Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi”

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. “Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes)” (Indriasari dan Nahartyo, 2008).

Menurut Tjiptoherijanto (2001), dikutip oleh (Indriasari dan Nahartyo, 2008), “untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut.”

(Indriasari dan Nahartyo, 2008) juga mengemukakan bahwa :

“jumlah sumber daya manusia yang tepat dan dengan kompetensi yang baik akan mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia saling berhubungan. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihanpelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.”

Menurut Griffin (2004) dalam Delanno (2013), Kapasitas Sumber Daya

Manusia dapat diukur melalui:

1. **Pendidikan**, Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.
2. **Pelatihan**, Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.
3. **Pengalaman**, Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan

Menurut (Alimbudiono, Sandra dan Fidelis 2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari :

1. **Tanggung Jawab**, Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas. Tanggung jawab yang baik adalah dapat memahami dan melaksanakan tugas sesuai deskripsi jabatan.
2. **kompetensi sumber daya**, kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan uraian diatas, indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari hasil modifikasi peneliti, diantaranya: (1) latar belakang pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman, (4) keterampilan, dan (5) sikap (*attitude*).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam sebuah perusahaan/instansi, kapasitas sumber daya manusia belum cukup memadai dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008)

“Kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual.”

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa peran teknologi informasi sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan. Terkait hal tersebut Hamzah (2009) juga mengemukakan bahwa:

“Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik, mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government*”

Pelaporan keuangan yang dilakukan secara manual dinilai sangatlah tidak efektif. Seperti yang dikemukakan oleh Primayana, dkk. (2014) bahwa:

“Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan.”

2.1.6 Sistem Informasi Akuntansi

Definisi sistem informasi akuntansi (SIA) menurut Wing Wahyu Winarno (2006), yaitu:

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem. Suatu sistem memiliki banyak komponen yang saling berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi akuntansi (SIA) juga memiliki banyak komponen dengan fungsi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang fungsional yang mendasari sistem fungsional lainnya seperti sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi lain membutuhkan data keuangan dari sistem informasi akuntansi. Menurut Azhar Susanto (2013) dalam Diah (2015), sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kumpulan (integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan”

Dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang menghasilkan informasi keuangan guna untuk membantu sebuah perusahaan/instansi dalam pengelolaan keuangan.

Dalam mengukur kualitas sistem informasi akuntansi, maka secara umum informasi akuntansi memiliki empat dimensi kualitas informasi menurut Azhar Susanto (2013) dalam Diah (2015), yaitu:

- “1. **Akurat** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersebut benar-benar mencerminkan situasi dan kondisi yang ada
2. **Relevan** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
3. **Tepat waktu** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi tersedia pada saat informasi tersebut diperlukan.
4. **Lengkap** – dapat diartikan bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan tersebut telah selengkap yang diinginkan dan dibutuhkan”

Dimensi tersebut dapat diperluas menjadi:

1. Efektif
2. Efisiensi
3. Confidensial
4. Integritas
5. Ketersediaan
6. Kepatuhan
7. Kebenaran informasi

Adapun penjelasan mengenai dimensi sistem informasi akuntansi menurut Diah (2015) sebagai berikut:

4. **Efektif** – berkaitan dengan relevansi suatu informasi dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk didalamnya harus disajikan dalam waktu yang tepat, akurat, konsisten, dapat digunakan dan lengkap.
5. **Efisiensi** – berkaitan dengan penyajian informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal (produktif dan ekonomis)
6. **Confidensial** – berkaitan dengan proteksi yang diberikan terhadap informasi yang sensitif

7. **Integritas** – berkaitan dengan akurasi, kelengkapan informasi dan validitasnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.
8. **Ketersediaan** – berkaitan dengan informasi yang selalu harus tersedia saat diperlukan oleh pemakai
9. **Kepatuhan** – berkaitan dengan terhadap undang-undang, peraturan pemerintah serta tanggung jawab terhadap pihak eksternal.
10. **Kebenaran informasi** – berkaitan dengan sistem informasi yang menyajikan informasi yang mencerminkan keadaan sesungguhnya.

2.1.7 Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah

Salah satu aplikasi resmi pemerintah Kabupaten Bone yang berguna dalam pengelolaan keuangan daerah adalah SIAKUDA. Berikut penjelasan mengenai SIAKUDA:

2.1.7.1 Pengawasan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah tentunya menginginkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang lebih komprehensif dimana informasi tersebut meliputi informasi mengenai posisi keuangan suatu daerah. Maka pemerintah memerlukan suatu sistem yang dapat menghasilkan informasi tersebut. Sistem tersebut harus mengacu pada peraturan daerah nomor 13 tahun 2006 tentang “pedoman pengelolaan keuangan daerah”. Atas dasar Peraturan menteri tersebut pemerintah Kabupaten Bone mengembangkan sebuah sistem informasi terkait pengelolaan keuangan daerah yaitu SIAKUDA atau Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah. SIAKUDA ini hampir sama dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) perbedaannya adalah SIPD terhubung langsung oleh kementerian dalam negeri sedangkan SIAKUDA sendiri merupakan sistem yang hanya terhubung oleh pemerintah Kabupaten Bone dan dijadikan sebagai transparansi anggaran maupun sebagai arsip anggaran keuangan Kabupaten Bone.

SIAKUDA dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah kabupaten Bone yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada asas efesiensi, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. SIAKUDA ini merupakan salah satu aksi nyata fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Bone terkait dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bone, hal ini pemerintah berharap agar aplikasi ini dapat memudahkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga arsip data dalam pengelolaan dapat bersifat transparan dan akuntabel sehingga dapat mengurangi tingkat kecurangan terkait anggaran keuangan daerah Kabupaten Bone.

SIAKUDA dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone dan berada dalam pengawasan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone, aplikasi ini dikelola oleh Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan.

1.1.7.2 Fitur- Fitur Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

1. Membuat laporan penganggaran
 - a. Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD)
 - b. Rincian Anggaran pendapatan
 - c. Rincian Anggaran Belanja
 - d. Anggaran Belanja Langsung

e. Anggaran Belanja Tidak Langsung

f. dan lain sebagainya.

2. Membuat laporan penatausahaan

a. Rincian Realisasi Belanja & Pengesahan

b. Buku Kas Umum (BKU)

c. Buku Kas Tunai

d. Buku Kas di Bank

e. Buku pembantu Pajak

f. Buku pembantu Pajak Gaji

g. Buku pembantu panjar

h. Buku Rincian objek kegiatan per rekening

i. Register Penutupan Kas

j. Laporan kemajuan fisik dan keuangan APBD

k. Dan Lain sebagainya.

3. Membuat laporan akuntansi

a. Ringkasan Realisasi Anggaran

b. Laporan Realisasi Anggaran

c. Laporan Operasional

d. Neraca

e. Laporan Perubahan Ekuitas

f. Laporan Perubahan SAL

g. Laporan Arus Kas

Pemerintah menyelenggarakan SIAKUDA dengan tujuan mempunyai fungsi :

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah.
2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah.
3. Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah.
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat sehingga informasi keuangan yang dihasilkan bersifat transparan dan akuntabel.
6. Mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIAKUDA

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu penulisan penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan permasalahan penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Emilda Ihsanti (2014) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)”. Variabel yang digunakan adalah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Provinsi Sumatra barat kab. Lima Puluh Kota. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Lima Puluh Kota. Sampel penelitian ini diperoleh dari kepala sub bagian keuangan, bendahara, dan staf, maka didapat responden sebanyak 75 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dengan bantuan SPSS 15. Hasil penelitian menunjukkan: bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penerapan SAKD tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2. Dian Irma diani (2014) dengan judul penelitian “pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah di kota pariaman)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi adalah 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampelnya adalah metode *total sampling*. Teknik Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Maulana Yusuf (2016) dengan judul “pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan”. Objek penelitian adalah Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sampling jenuh. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,721. Hal ini menunjukkan bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Winda Indriani (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Bengkulu” merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelola keuangan dari 20 SKPD Kota Bengkulu. Variabel dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel bebas, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis

menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

5. Femi Bagoë (2013) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Gorontalo.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang telah mampu memberikan kontribusi atau pengaruh faktor-faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam pengujian ini. Kata Kunci: sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, efektivitas pengelolaan keuangan daerah

2.3 Kerangka Pikir

Kapasitas sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini mencoba mencari kejelasan tentang pengaruh Kapasitas sumber daya manusia dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Bone.

Hubungan antar-antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar. kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



2.1 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016) “hipotesis di artikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi (parameter) yang akan di uji kebenarannya berdasarkan data yang di peroleh dari sampel penelitian (statistik)”. Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pikir diatas maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini :

H1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone

H2 : Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone

H3 : Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) secara bersama sama berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone yang berlokasi di jalan Andi Mappanyukki. Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Adapun waktu penelitian diperkirakan kurang lebih selama dua bulan yang akan dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner

Pengumpulan data menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan , dapat dipercaya, objektif, dan dapat dijadikan landasan dalam proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2016), “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa : “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.”.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur sehingga dapat memperoleh data yang sistematis ,lengkap,jelas dan mudah dipahami.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004) mengatakan bahwa “metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan”. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian

4. Observasi

Menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa “Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain”. Metode ini dilakukan dengan melihat langsung di lapangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian, peneliti harus memahami dan menentukan jenis data dan sumber data dalam penelitian. Maka dari itu jenis data dan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif . Data-data dari penelitian ini dikumpulkan lalu diolah dan dianalisis. Jadi data kuantitatif merupakan data yang dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik dan data

tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa pertanyaan yang dikasih bobot.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan sumber informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu; data primer dan data sekunder.

1. Menurut Sugiyono (2016) “Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pegawai BPKAD Kab. Bone pada bidang akuntansi, bidang anggaran dan bidang perbendaharaan.
2. Menurut Sugiyono (2016) “data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Teknik pengumpulan data sekunder ini digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui *website* resmi BPKAD Kab.Bone.

3.4 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi dan sampelnya adalah sebagai berikut:

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2016) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Bone pada bidang akuntansi, bidang anggaran dan bidang perbendaharaan.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *proportionate Stratified Random* dalam menentukan jumlah sampel. Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai unsur yang tidak homogen dan berstrata/berlapis secara proporsional. Teknik pengambilan sampel pada populasi yang tidak homogen yaitu dengan mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara karakteristik yang ditentukan akan terpilih menjadi sampel.

Kriteria sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai yang melaksanakan secara langsung terhadap pelaporan keuangan
2. Mengelola sistem SIAKUDA

Untuk memperoleh besar sampel peneliti menggunakan rumus *slovin*. n

$$= \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n: Ukuran Sampel

N: Ukuran Populasi

e: Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini (e : 5%)

Sub populasi yang terpilih yaitu:

- a. Bidang Anggaran 15 orang
- b. Bidang pembendaharaan 16 orang
- c. Bidang Akuntansi 12 orang

Perhitungan ukuran sampel :

$$n = \frac{43}{1+43(0.05)^2}$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka ukuran besar sampel yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 39 responden dari populasi pegawai BPKAD di bidang akuntansi, bidang perbendaharaan dan bidang anggaran Kabupaten Bone. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bidang tersebut ditentukan kembali dengan rumus :

$n = (\text{populasi kelas/jumlah populasi keseluruhan}) \times \text{jumlah sampel yang ditentukan}$

- a. Bidang Anggaran $15/43 \times 39 = 13,60$ dibulatkan 14
- b. Bidang Perbendaharaan $16/43 \times 39 = 14,51$ dibulatkan 14
- c. Bidang Akuntansi. $12/43 \times 39 = 10,88$ dibulatkan 11

Sehingga dari keseluruhan sampel kelas tersebut adalah 39 responden.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2016) dalam Lany astiyani (2017) “analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen”

Adapun persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y : kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kab. Bone

α : konstanta

X1 : kapasitas sumber daya manusia

X2 : peranan sistem informasi administrasi keuangan daerah

β_1 - β_2 : koefisien regresi

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Suryoatmono (2004) menyatakan :

“Statistika Deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu

1. Ukuran Lokasi: mode, mean, median, dll
2. Ukuran Variabilitas: varians, deviasi standar, range, dll
3. Ukuran Bentuk: *skewness, kurtosis, plot boks*”.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Winda (2016) “Uji kualitas data ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua konsep dalam mengukur kualitas suatu data yaitu uji Validitas dan uji realibilitas”.

3.5.2.1 Uji Validitas

“Validitas adalah alat ukur digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner” (Ghozali, 2013). Suatu kuisisioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh

kuisisioner tersebut. Uji validitas digunakan metode *pearson correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. “Apabila korelasi antar skor masing masing butir pertanyaan dengan total skor tiap konstruknya signifikan pada level 0,01 dan 0,05, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid “ (Ghozali, 2013).

3.5.2.2 Uji Reliabilitas

“Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* yaitu pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Dalam hal ini SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik dengan *cronbach alpha* (α). Menurut Ghozali (2013) “suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan cronbach alpha > 0,70”.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi :

3.5.3.1 Uji normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan nilai *residual* mengikuti distribusi normal. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal. Jika asumsi ini dilanggar maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. “Distribusi data akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05” (Ghozali, 2013).

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Menurut Ghozali (2013) “masalah Multikolinearitas terjadi apabila nilai *Tolerance* nya $< 0,10$ atau jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ ”.

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi *problem* heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. “Uji ini ditempuh dengan melakukan regresi terhadap nilai logaritma dari kuadrat residual” (Ghozali, 2013). Untuk menguji heteroskedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikan korelasi *Rank Spearman* antara masing-masing variabel independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat Heterokedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat Heterokedastisitas. Selain itu uji heterokedastisitas juga dapat dilihat melalui koordinat *scatterplot*. Jika titik koordinat menyebar diatas dan dibawah

sumbu Y atau tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terdapat heterokedastisitas.

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problemautokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Pada data crossection(silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Adapun Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson(DW test), Imam Ghozali (2013).

Tabel 3.1 Syarat Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Disicion	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Disicion	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber : Imam Ghozali, (2013)

3.5.4 Uji Hipotesis

“Pengujian hipotesis adalah membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau anggapan tentang parameter populasi yang tak diketahui berdasar informasi dari sampel yang diambil dari populasi tadi” (Mulyono, 2006).

3.5.4.1 Uji Simultan (Uji F)

Ghozali (2013) mengemukakan bahwa :

“Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama sama (simultan) terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu:

1. Apabila probabilitas signifikansi > 0.05 , maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Apabila probabilitas signifikansi < 0.05 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.”

3.5.4.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji-t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Arah pengaruh variabel dilihat berdasarkan nilai koefisien regresinya. Maka dari itu Ghozali (2013) mengatakan bahwa:

“jika nilai koefisien regresinya positif, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai koefisien regresinya negatif, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel dependen“.

Menurut Setiawan (2017), Uji statistik t dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial/individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R^2) yang nilainya antara 0 - 1. Jika R^2

menunjukkan variabel independen bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R² (Ghozali, 2013).

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.6.1 Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah :

a. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut.

b. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (X2)

SIAKUDA dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah kabupaten Bone yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasar pada asas efesiensi, ekonomis, transparan, akuntabel dan auditabel. SIAKUDA ini merupakan

salah satu aksi nyata fasilitasi dari pemerintah kabupaten Bone terkait dalam pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Bone

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.

Adapun instrumen instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Instrumen Penelitian

No.	Variabel Penelitian	Indikator	Referensi
1	Kapasitas Sumber Daya Manusia	Latar belakang pendidikan	Alimbudiono (2004), dan Griffin (2004)
		pelatihan	
		pengalaman	
		etika/ <i>attitude</i>	
2	Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah	akurat	Delone dan McLean (1992) dalam jogiyanto (2007)
		relevan	
		tepat waktu	
		lengkap	
3	Kualitas Laporan Keuangan	Relevan	PP No. 71 tahun 2010
		Andal	
		Dapat Dibandingkan	
		Dapat dipahami	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum BPKAD Kab. Bone

4.1.1 Sejarah BPKAD Kab. Bone

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone sebelumnya dikenal dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Pada tahun 2016 berganti nama menjadi BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) hingga sekarang. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Bidang Keuangan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota dan juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone PERDA Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Badan pengelola keuangan Daerah Kabupaten Bone.

Hal tersebut dilatarbelakangi karena permasalahan keuangan merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Untuk mengimplementasikan semangat Undang-undang dan Peraturan Daerah tersebut, pertama-tama yang harus dilaksanakan adalah penataan kelembagaan di daerah, khususnya yang menangani permasalahan keuangan. Itulah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bone berperan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

BPKAD Kab. Bone Memiliki 4 (empat) tugas penting yang bersifat integral didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone, dengan asumsi bahwa target yang telah ditetapkan secara optimal harus bisa dicapai, dan secara struktural sebagai perangkat daerah dituntut pula untuk menunjang pencapaian Visi Kabupaten Bone.

4.1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kab. Bone

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone terletak di Jalan Andi Mappanyukki Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Susunan lengkap organisasi di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bone terdiri dari:

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a) kepala Badan

Kepala Badan, mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam melaksanakan sebagian urusan dibidang Pngelolaan Keuangan Daerah

b) Sekretariat

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Sub. Bagian Keuangan.

3. Sub.Bagian Program dan Perencanaan

c) Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub. Bidang Penyusunan Anggaran Belanja langsung

2. Sub. Bidang Penyusunan Anggaran Belanja tidak langsung

3. Sub. Bidang Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

d) Bidang Perbendaharaan

1. Sub. Bidang Administrasi Perbendaharaan

2. Sub. Bidang Pengelolaan Gaji

3. Sub. Bidang Verifikasi

e) Bidang Akuntansi terdiri dari

1. Sub. Bidang Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban Pendapatan dan penerimaan pembiayaan

2. Sub. Bidang Akuntansi Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja dan pengeluaran pembiayaan

3. Sub. Bidang Evaluasi dan penyusunan Laporan Keuangan

f) Bidang Asset terdiri dari :

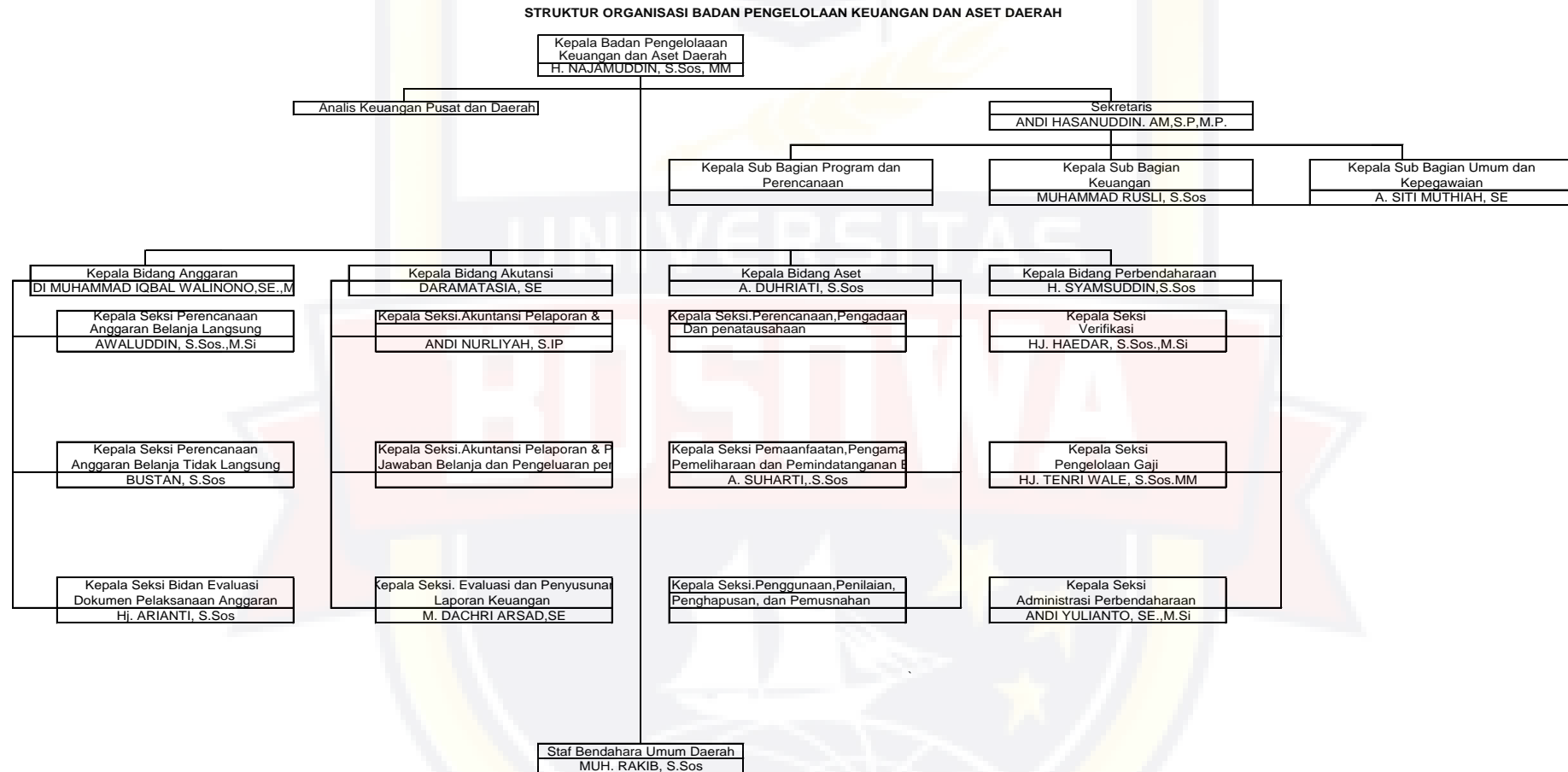
1. Sub. Bidang Perencanaan, pengadaan dan Penata usahaan

2. Sub. Bidang Pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah

g) Kelompok Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Bone



4.1.3 Tugas dan Fungsi BPKAD Kab. Bone

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone. Kedudukan BPKAD adalah pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone memiliki Tugas dan Fungsi yang harus di jalankan. Adapun Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Tugas Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Bone

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
2. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing bagian organisasi Kantor Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah tugas dari masing masing bagian organisasi sesuai isi Peraturan Bupati Bone Nomor 89 Tahun 2016:

1. Kepala Badan

- 1.) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam melaksanakan sebagian urusan dibidang Pngelolaan Keuangan Daerah
- 2.) Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan fungsi BUD;
 - d. Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 3.) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- b. Mengesahkan SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

2. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
3. Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan persuratan;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga;
3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan LHKPN;
5. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, dokumentasi, ketatalaksanaan dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
6. Melaksanakan perencanaan dan pengadaan pegawai, mutasi kepegawaian, serta pemberhentian dan pensiun;
7. Melaksanakan pengembangan karier pegawai, pembinaan jabatan fungsional, serta pengelolaan data dan arsip kepegawaian; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas :

1. Menyusun RKA dan DPA/DPPA;
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran dan penggajian pegawai;
3. Melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
4. Melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;

5. Melaksanakan pengendalian, pelaporan keuangan dan pengawasan pembukuan perbendaharaan;
 6. Menyiapkan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan (PPK);
 7. Melaksanakan pengadaan barang jasa; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
 2. Menyusun dokumen LAKIP, RENSTRA, RENJA, LPPD, LKPJ dan laporan pelaksana kerja lainnya;
 3. Melaksanakan monev program dan anggaran;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara berkala; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris badan sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
2. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P;

3. Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
dan
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung yang mempunyai tugas :
 1. Menyusun dan menyiapkan data anggaran belanja langsung;
 2. Melakukan evaluasi data anggaran belanja langsung sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P;
 3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD untuk belanja langsung; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan tugasnya.
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang mempunyai tugas :
 1. Menyusun dan menyiapkan data perencanaan anggaran belanja gaji, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah;
 2. Melakukan evaluasi belanja anggaran belanja gaji, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan

keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan daerah sebagai bahan penyusunan APBD dan APBD-P;

3. Menyusun rancangan APBD dan rancangan APBD-P untuk anggaran belanja gaji, belanja bunga, belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan belanja pembiayaan ; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD);
 2. Melakukan evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 3. Menyiapkan arsip Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD); dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang

perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaraan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi ;
 2. Pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Membayar dari SKPD;
 3. Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
 4. Pelaksanaan sistim penggajian, pelaporan data-data PNS yang efektif dan efisien;
 5. Pelaksanaan koordinasi penerimaan daerah; dan
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan yang mempunyai tugas :
1. Menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian bendahara;
 2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

3. Melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan administrasi keuangan daerah; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaansesuai dengan tugasnya.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Gaji oleh Kepala Sub Bidang Pengelolaan Gaji yang Mempunyai Tugas:
1. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan program kegiatan pengelolaan gaji;
 2. Memproses surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji;
 3. Melaksanakan system penggajian, pelaporan dan data-data pns yang efektif dan efisien;
 4. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan gaji, melaksanakan pemberian pertimbangan dan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perbendaharaansesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bidang Verifikasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Verifikasi yang Mempunyai Tugas:
1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD;
 2. Melaksanakan penelitian dan pengujian surat pertanggungjawaban (SPJ-LS);

3. Memberikan rekomendasi pengesahan Surat Perintah Membayar dan SPJ-LS; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan mengendalikannya, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi;
 2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah pada skpd;
 3. Pelaksanaan pembinaan dan bimtek akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya;
 4. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan

dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan system akuntansi serta pelaporan pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
2. Melakukan verifikasi pendapatan yang telah diterima dan rekonsiliasi dengan bud;
3. Melakukan konsolidasi laporan realisasi pendapatan dengan skpd; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi sesuai dengan tugasnya.

b. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan sistem akuntansi serta pelaporan belanja dan pengeluaran pembiayaan;
2. Melakukan verifikasi SP2D yang telah diterbitkan dan rekonsiliasi dengan bud;
3. Melakukan konsolidasi laporan realisasi belanja dengan skpd; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi sesuai dengan tugasnya.

c. Sub Bidang Evaluasi dan penyusunan Laporan Keuangan oleh Kepala Sub Bidang Evaluasi dan penyusunan laporan keuangan yang mempunyai tugas:

1. Melakukan evaluasi pendapatan dan belanja daerah;

2. Melakukan proses akuntansi keuangan dalam penyusunan LKPD;
3. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap pelaksanaan APBD;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang akuntansi sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang aset yang menjadi Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 2. Pelaksanaan koordinasi penatausahaan, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan, pemindaan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah (bmd); dan
 3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan, pengadaan dan Penata Usahaan yang mempunyai tugas :
1. Melakukan konsolidasi penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;

2. Melaksanakan konsolidasi penatausahaan meliputi pembukuan daftar barang pengguna dan daftar barang pengelola, melakukan inventarisasi serta menyusun laporan semester dan laporan tahunan Barang Milik Daerah; dan
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.
- b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/ Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang mempunyai tugas:
1. Menyiapkan data pemanfaatan BMD, meliputi Sewa, Pinjam Pakai, Kerja sama Pemanfaatan (KSP), BGS atau BSG dan kerja sama pemanfaatan infrastruktur ;
 2. Menyiapkan data pengamanan/pemeliharaan Barang Milik Daerah baik pengamanan dokumen maupun fisik;
 3. Menyiapkan data pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.
- c. Sub Bidang Penggunaan, Penilaian, Pemusnahan dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penggunaan Penilaian, Pemusnahan dan Penghapusan yang mempunyai tugas :
1. Menyiapkan data penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;

2. Melakukan penilaian Barang Milik Daerah;
3. Menyiapkan data penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset sesuai dengan tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana, melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Deskripsi data

Populasi pada penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan pelaporan keuangan dan menjalankan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) diantaranya yaitu pada bidang akuntansi, bidang anggaran dan bidang perbendaharaan. Dengan rincian :

Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No.	Nama bidang	Kuesioner disebar	Kuesioner kembali
1	Akuntansi	15	12
2	Perbendaharaan	15	13
3	Anggaran	15	13
Total		45	38

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Dari 45 (100%) kuesioner yang disebar, 38 (84%) kuesioner yang diterima kembali, dan 7 (16%) kuesioner tidak kembali. 38 kuesioner yang kembali secara keseluruhan dapat diolah karena di isi secara jelas oleh responden. Rincian mengenai pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Persentase Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Responden	
	Jumlah	Persentase (%)
Kuesioner yang disebar	45	100%
Kuesioner yang dikembalikan	38	84%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	-	-
Kuesioner yang dapat diolah	38	100%

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Data responden yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur responden, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan bidang kerja. Adapun gambaran umum responden disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Tingkat Pendidikan, Latar Belakang Pendidikan dan Masa Kerja

Uraian		Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Pria	11	29%
	Wanita	27	71%
Total		38	100%
Umur	20 - 30 tahun	7	18%
	31- 40 tahun	15	40%
	41 - 50 tahun	16	42%
	>50 tahun	-	-
Total		38	100%
Tingkat pendidikan	SMA	1	3%
	D3	5	13%
	S1	23	60%
	S2	9	24%
Total		38	100%
Latar belakang pendidikan	Akuntansi	14	37%
	Manajemen	6	16%
	Pertanian	-	-
	MIPA	-	-
	Lain – lain	18	47%
Total		38	100%
Masa kerja	< 1 tahun	2	5%
	1 – 5 tahun	8	21%
	> 5 tahun	28	74%

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden yang bekerja pada pengelolaan keuangan khususnya pada bidang

Anggaran, akuntansi dan perbendaharaan didominasi oleh wanita dengan jumlah 27 orang atau sebesar 71%, sedangkan responden pria sebanyak 11 orang atau sebesar 29% saja. Berdasarkan umur responden, rata rata umur responden dalam penelitian ini yaitu kisaran 31 tahun smpai 50 tahun. Dapat dilihat dari persentase untuk umur 31 – 40 tahun yaitu sebesar 40% sedangkan persentase kisaran umur 41 – 50 tahun juga cukup tinggi yaitu sebesar 42%. Hal ini menandakan bahwa kisaran 31 – 50 tahun usia responden, memiliki kemampuan menjalankan tugas dengan baik dalam pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, berdasarkan tingkat pendidikan responden, sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1 sebesar 60% atau sebanyak 23 orang. Responden yang melanjutkan pendidikan sampai S2 juga cukup banyak yaitu sebesar 24% sedangkan untuk tamatan SMA hanya 1 orang dan tamatan D3 sebanyak 5 orang. Berdasarkan latar belakang pendidikan, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan bidang kerjanya yaitu sebesar 47% atau sebanyak 18 orang. Namun responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi juga cukup banyak yaitu sebesar 37% atau sebanyak 14 orang dan untuk manajemen sebanyak 6 orang atau 16%. Hal ini berarti responden memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang cukup memadai untuk menjalankan tugas dengan baik terkait pengelolaan keuangan walaupun rata rata responden berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda – beda.

Berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dengan persentase sebesar 74%. Sedangkan, untuk yang bekerja

pada kisaran 1 sampai 5 tahun sebesar 28% dan yang bekerja di bawah 1 tahun hanya sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa, pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman kerja yang cukup baik. Sehingga dalam pengelolaannya para pegawai yang berada pada bidang tersebut mampu mempelajari kesalahan kesalahan laporan keuangan pada periode sebelumnya dan dapat memperbaiki kesalahan tersebut untuk periode berikutnya.

Berdasarkan data yang ditunjukkan dari identitas responden, pada umumnya memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan memiliki masa kerja yang cukup lama. Sehingga diharapkan pernyataan pernyataan yang dijawab oleh responden dapat menggambarkan hal yang sebenarnya.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kapasitas sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah sedangkan untuk variabel terikat nya yaitu kualitas laporan keuangan.

- a. Analisis deskriptif kapasitas sumber daya manusia

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Kapasitas Sumber Daya Manusia

Item Pernyataan	Frekuensi				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X1.1	0	12	18	8	110	2.89
X1.2	0	3	29	6	117	3.08
X1.3	0	2	31	5	117	3.08
X1.4	0	1	28	9	122	3.21
X1.5	0	0	24	14	128	3.37
X1.6	0	0	32	6	120	3.16
X1.7	0	0	19	19	133	3.5

X1.8	0	0	17	21	135	3.55
X1.9	0	1	19	18	131	3.45
Rata-Rata Keseluruhan						3.25

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai rata-rata variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar 3,25 , hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan pada variabel kapasitas sumber daya manusia. Nilai tertinggi terdapat pada pernyataan ke 7 yaitu bersikap jujur sesuai dengan data yang disajikan. Dalam hal ini apabila seorang individu menerapkan sikap jujur pada kondisi apapun, maka bersikap jujur akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya. Termasuk dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

- b. Analisis deskriptif penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah

Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah

Item Pernyataan	Frekuensi				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
X2.1	0	1	26	11	124	3.26
X2.2	0	5	30	3	112	2.95
X2.3	0	0	27	11	125	3.29
X2.4	0	2	24	12	124	3.26
X2.5	0	2	29	7	119	3.13
X2.6	0	5	28	5	114	3.00
X2.7	0	5	26	7	116	3.05
X2.8	0	0	29	9	123	3.24
X2.9	0	2	26	10	122	3.21
Rata-Rata Keseluruhan						3.15

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai rata-rata variabel penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah sebesar 3,15 ,

hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju terhadap pernyataan pada variabel penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah. Nilai tertinggi terdapat pada pernyataan ke 3 yaitu informasi yang dihasilkan oleh sistem ini bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkan. Artinya, dengan adanya sistem ini maka akan lebih memudahkan pegawai dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

c. Analisis kualitas laporan keuangan daerah

Tabel 4.6 analisis deskriptif kualitas laporan keuangan daerah

Item Pernyataan	Frekuensi				Skor	Mean
	STS	TS	S	SS		
Y1	0	0	18	20	134	3.53
Y2	0	0	18	20	134	3.53
Y3	0	0	21	17	131	3.45
Y4	0	2	25	11	123	3.24
Y5	0	0	19	19	133	3.5
Y6	0	0	31	7	121	3.18
Y7	0	1	26	11	124	3.26
Y8	0	0	21	17	131	3.45
Y9	0	0	27	11	125	3.29
Rata-Rata Keseluruhan						3.38

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai rata-rata variabel Y sebesar 3,38, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pada instansi ini dapat memberikan informasi mengenai kesalahan yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya begitu juga sebaliknya laporan keuangan yang dihasilkan juga mampu memperkirakan keadaan laporan keuangan pada periode berikutnya.

4.3.2 Hasil Uji Kualitas Data

Suatu penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument kuesione, harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah instrument kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data bersifat valid dan reliable. Karena, kebenaran data yang diolah sangat menentukan hasil penelitian nantinya. Untuk menguji suatu instrumen valid dan reliable yaitu dengan uji validitas data dan uji reliabilitas data menggunakan SPSS.

4.3.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas data bertujuan untuk mengukur sah atau validnya suatu instrument kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data. Pengujian data ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya :

1. Menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan menghitung korelasi antar skor masing – masing butir pernyataan dengan total skor. Untuk menentukan valid tidaknya dapat dilihat dari signifikansinya. “Jika signifikansi $< 0,05$ data dapat dikatakan valid , sebaliknya jika signifikansi $> 0,05$ data dikatakan tidak valid. (Ghozali 2009). “
2. Untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data dapat diukur juga dengan melihat nilai *Corrected Item Total Corelation* yaitu apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid.

Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 38 responden , dan besar df dapat dihitung sebagai berikut :

$$df = n - 2$$

$$df = 38 - 2$$

$$= 36$$

Dengan signifikansi 5% (tingkat kepercayaan 95% atau alpha 0,05) maka ditemukan nilai r tabel sebesar 0,3202.

Jadi, item pernyataan yang valid harus memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig (2-tailed)	standar sig(<0.05)	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1)	X1.1	0,443	0,3202	0,005	0.05	Valid
	X1.2	0,644	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.3	0,691	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.4	0,765	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.5	0,802	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.6	0,441	0,3202	0,006	0.05	Valid
	X1.7	0,783	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.8	0,795	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X1.9	0,692	0,3202	0,00	0.05	Valid
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (X2)	X2.1	0,644	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.2	0,660	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.3	0,752	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.4	0,794	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.5	0,874	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.6	0,447	0,3202	0,005	0.05	Valid
	X2.7	0,749	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.8	0,817	0,3202	0,00	0.05	Valid
	X2.9	0,798	0,3202	0,00	0.05	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,720	0,3202	0,00	0.05	Valid
	Y2	0,647	0,3202	0,00	0.05	Valid
	Y3	0,709	0,3202	0,00	0.05	Valid
	Y4	0,615	0,3202	0,00	0.05	Valid

Y5	0,853	0,3202	0,00	0.05	Valid
Y6	0,399	0,3202	0,013	0.05	Valid
Y7	0,563	0,3202	0,00	0.05	Valid
Y8	0,727	0,3202	0,00	0.05	Valid
Y9	0,688	0,3202	0,00	0.05	Valid

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh item pernyataan kuesioner memiliki nilai R hitung > R tabel dan nilai sig semua item juga > 0,05 . artinya bahwa item item tersebut dinyatakan valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

4.3.2.2 Uji realibilitas data

Uji realibilitas berguna untuk menguji apakah item kuesioner yang dipergunakan untuk penelitian bersifat reliable atau tidak. Reliable artinya apakah seluruh item pernyataan relatif konsisten dengan kata lain realibilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai cronchbach alpha > nilai batas (0,60). Hasil pengujian realibilitas data pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Realibilitas

no.	Variabel	cronchbach's alpha	keterangan
1	kapasitas sumber daya manusia	0,762	reliabel
2	penerapan sistem informasi keuangan daerah	0,774	reliabel
3	kualitas laporan keuangan daerah	0,744	reliabel

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai cronchbach's alpha lebih dari 0,60 yang artinya seluruh item kuesioner setiap variabel dinyatakan handal atau dapat dipercaya atau bersifat reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedasitas.

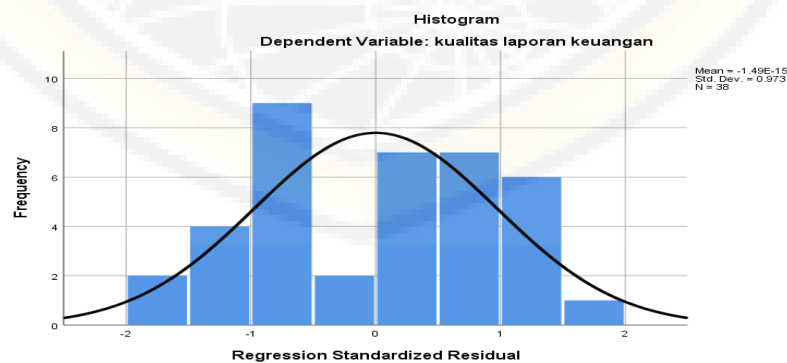
4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi setiap variabel mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah jika memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika, asumsi tidak sesuai ketentuan maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Untuk pengujian nya dapat dilihat berdasarkan histogram , P plot dan kolmogorov.

a. Histogram

Berdasarkan grafik histogram, data dikatakan normal apabila pola nya melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti gunung. Hasil uji normalitas pada penelitian ini berdasarkan grafik histogram dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.2 grafik histogram normalitas



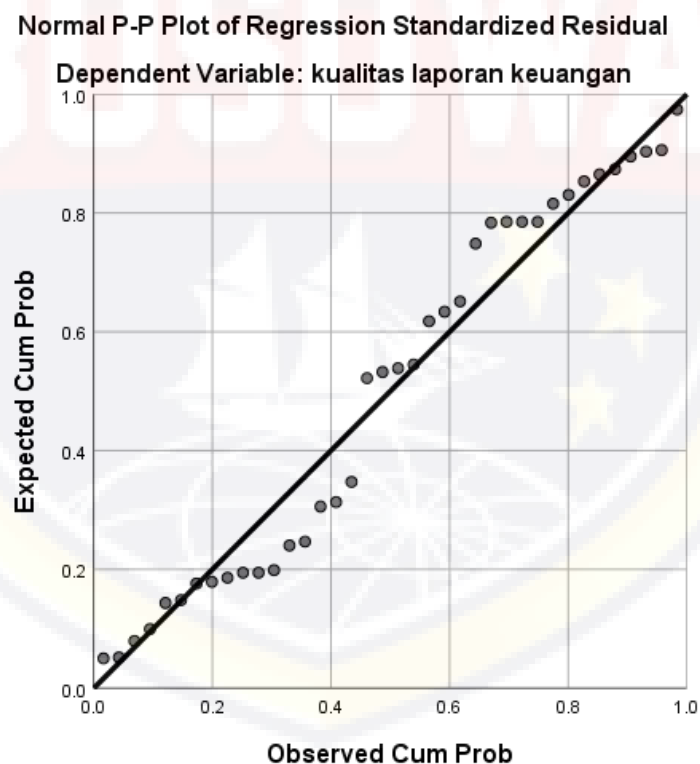
Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Pada gambar diatas grafik histogramnya melenceng ke kanan atau membentuk pola gunung yang artinya data tersebut terdistribusi normal. Namun asumsi tersebut belum bisa dikatakan dengan pasti. oleh karena itu, selanjutnya diperlukan pengujian berdasarkan P-Plot.

b. P- plot

Berdasarkan grafik P-plot data dikatakan normal apabila titik-titik koordinatnya mengikuti garis diagonal sebaliknya, ketika koordinat menyebar atau tidak sejalan dengan garis diagonal maka data tersebut tidak normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini berdasarkan P-plot bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.3 Grafik P-plot Normalitas



Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Pada grafik P-plot diatas titik titik koordinat mengikuti garis diagonal. Hal ini berarti distribusi data dapat dikatakan normal.

c. Kolmogorov-smirnov

Berdasarkan sample Kolmogorov-smirnov data terdistribusi normal apabila signifikansinya $> 0,05$. Hasil uji normalitas berdasarkan sample kolmogorv-smirnov dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.4 Grafik Kolmogorv-Smirnov Normalitas

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.42399126
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.128
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.092 ^c

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya 0,092 yang artinya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti berdasarkan grafik histogram , grafik P-plot dan nilai sig kolomogrov-smirnov, data data tersebut memenuhi asumsi normalitas sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam regresi linear berganda.

4.3.3.2 Uji multikolinieritas

Uji ini berguna untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk memenuhi asumsi model regresi yang baik maka seharusnya tidak ditemukan korelasi antar variabel dependen. Hal ini

dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor (VIF)* dalam *collinearity statistics*. Batas nilai *tolerance* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10.

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.259	4.753		2.369	.023		
	kapasitas SDM	.390	.140	.402	2.776	.009	.927	1.079
	penerapan siakuda	.273	.131	.303	2.090	.044	.927	1.079

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

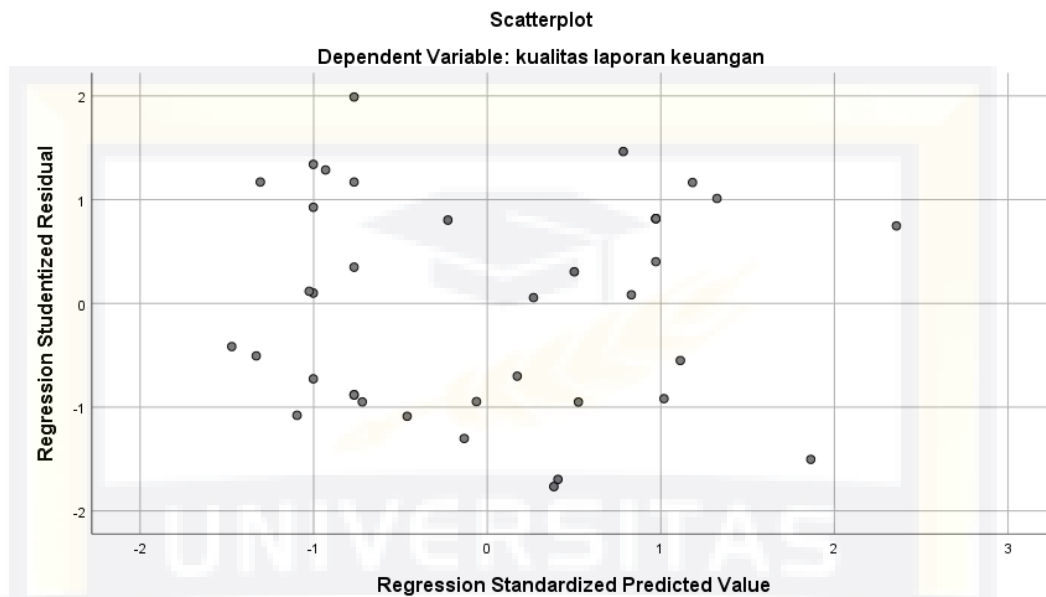
Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa VIF variabel kapasitas SDM (X1) dan penerapan SIAKUDA (X2) adalah $1,079 < 10$ dan nilai tolerance value $0,927 > 0,1$ maka data tersebut dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

4.3.3.3 Uji heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model regresi dapat dilihat dengan melihat pola pada scatterplot .jika pola data membentuk titik titik yang menyebar diatas dan dibawah maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, jika data membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang, dan sebagainya maka terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.5 Scatterplot Heterokedasitas



Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu melainkan titik titik tersebut menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas.

4.3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji ini berguna untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Syarat yang harus dipenuhi adalah tidak terjadinya autokorelasi dalam model regresi tersebut. Jika nilai $DW > DL$ atau $< (4-DL)$ maka tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565 ^a	.319	.280	2.492	1.764

a. Predictors: (Constant), Penerapan_SIAKUDA, Kapasitas_SDM

b. Dependent Variable: Kualitas_LKPD

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Nilai DW 1,764 nilai akan kita bandingkan dengan nilai tabel signifikansi 0,05. Dengan jumlah sampel 38 responden dan jumlah variabel 2 maka diperoleh nilai tabel Durbin Watson sebesar 1,587. Nilai DW (1,764) > DL (1,587) dan DW (1,764) < 4-dL (4-1,587 = 2,413). Maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi.

4.3.4 Uji Hipotesis

Teknik untuk menganalisis hipotesis H1, H2, dan H3 yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan meregresikan variabel independen (kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah) terhadap dependen (kualitas laporan keuangan daerah).

Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kab. Bone

α : konstanta

X1 : kapasitas sumber daya manusia

X2 : penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah

β_1 - β_2 : koefisien regresi

e : standar error

Berdasarkan analisis data yang menggunakan perhitungan regresi berganda dengan program Statistical for product and service solution (SPSS) versi 26, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Perhitungan Regresi Berganda (Hasil Uji t)

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	11.259	4.753		2.369	0.023		
	kapasitas SDM	0.39	0.14	0.402	2.776	0.009	0.927	1.079
	penerapan siakuda	0.273	0.131	0.303	2.09	0.044	0.927	1.079

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Persamaan regresi linear berganda tersebut adalah :

$$Y = 11,259 + 0,39X_1 + 0,273X_2$$

a.) Nilai konstantanya sebesar 11,259 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel bebas (Kapasitas SDM dan penerapan SIAKUDA) maka kualitas laporan keuangan daerah tetap menghasilkan 11,259 atau dengan kata lain

jika variabel independen sama dengan 0 maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan tetap terjadi sebesar 11,259.

- b.) Koefisien regresi variabel Kapasitas SDM (X1) sebesar 0,39 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu tingkat nilai X1 (kapasitas SDM) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,39
- c.) Koefisien regresi variabel penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKUDA) sebesar 0,273 yang menyatakan bahwa setiap kenaikan satu tingkat nilai X2 (penerapan SIAKUDA) maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sebesar 0,273.

4.3.4.1 Uji t (parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Syarat diterimanya hipotesis apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dengan taraf signifikansi 0,05. . dengan menggunakan sampel 38 responden dengan $df = n-k-1$ atau $df = 38-2-1 = 35$ maka diperoleh $t \text{ tabel}$ (2,030) dengan tingkat signifikansinya (α) 0,05.

Tabel 4.12 Hasil Uji t

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.259	4.753		2.369	0.023		
	kapasitas SDM	0.39	0.14	0.402	2.776	0.009	0.93	1.079
	penerapan siakuda	0.273	0.131	0.303	2.09	0.044	0.93	1.079

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1,H2 dan H3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut :

a.) Uji Hipotesis 1 (H1)

H0 = kapasitas SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone

H1 = kapasitas SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa t hitung (2.776) > t tabel (2,030) dengan taraf signifikansinya $0,009 < 0,05$. Maka, H0 ditolak dan hipotesis yang diterima adalah H1, yang artinya variabel kapasitas SDM secara individual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone.

b.) Uji Hipotesis 2 (H2)

H0 = Penerapan SIAKUDA tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone

H2 = Penerapan SIAKUDA berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung (2.09) > t tabel (2.030) dengan tariff signifikansinya $0,044 < 0,05$. Maka H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti variabel penerapan SIAKUDA secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada BPKAD Kab. Bone.

4.3.4.2 Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Syarat diterimanya hipotesis yaitu, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis yang diterima adalah H_3 dan sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis yang diterima adalah H_0 . F_{tabel} untuk sampel sebesar 38 responden ($df = n-k-1$) $df = 35$. Nilai F_{tabel} untuk $df = 35$ yaitu 3,27.

Tabel 4.13 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.861	2	50.931	8.199	.001 ^b
	Residual	217.402	35	6.211		
	Total	319.263	37			
a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan						
b. Predictors: (Constant), penerapan siakuda, kapasitas SDM						

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Uji Hipotesis 3 (H3)

H_0 = Kapasitas SDM dan penerapan SIAKUDA secara bersama sama tidak berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kab.

Bone

H_3 = Kapasitas SDM dan penerapan SIAKUDA secara bersama sama berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kab.

Bone

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa F hitung (8,199) > F tabel (3,27) dengan taraf signifikansinya $0,001 < 0,05$. Maka, hipotesis yang diterima adalah H_3 yang berarti variabel Kapasitas SDM dan Penerapan Kapasitas secara bersama sama berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kab. Bone.

4.3.5 Hasil Uji koefisien Determinasi

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.565 ^a	.319	.280	2.492	1.764

a. Predictors: (Constant), Penerapan_SIAKUDA, Kapasitas_SDM

b. Dependent Variable: Kualitas_LKPD

Sumber : Data diolah sendiri (2021)

Uji koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Pada tabel diatas dapat diketahui Nilai *R square* sebesar 0,319, hal ini berarti bahwa 31,9% yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan penerapan SIAKUDA dan sebesar 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti oleh penelitian ini. Besarnya nilai koefisien determinasi umumnya berkisar antara 0-1. Namun, Dalam penelitian ini koefisien determinasi yang diperoleh bernilai 0,319 yang artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) memiliki tingkat pengaruh yang lemah. Perlu diketahui bahwa jika nilai *R square* rendah bukan berarti model regresi yang digunakan buruk atau tidak baik. Menurut, Insukindro (1998) menekankan bahwa koefisien determinasi

hanyalah salah satu dan bukan satu satunya kriteria memilih model regresi yang baik. Alasannya, jika suatu regresi linier menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi tetapi tidak lolos dari uji asumsi klasik maka, model tersebut bukan model penaksir yang baik dan seharusnya tidak dijadikan sebagai model empiris. Selain itu jika nilai R square dibawah nol atau bernilai negative maka variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Jadi dapat dikatakan bahwa nilai R square dibawah 50% tetap memiliki pengaruh antara variabel (X) terhadap variabel terikat (Y) tetapi memiliki tingkat pengaruh yang lemah.

4.4 Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan SIAKUDA pada BPKAD Kab. Bone

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H1) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t hitungnya. Pada penelitian ini $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,776 > 2,030$) dengan taraf signifikansi 0,009 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

pada BPKAD Kabupaten Bone. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Winda Indriani (2016) variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki koefisien regresi (beta) sebesar 0,234 dan nilai t hitung 2,324 sedangkan nilai signifikansinya 0,023 (lebih kecil dari 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H2) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan melihat nilai t hitungnya. Pada penelitian ini $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,09 > 2,030$) dengan taraf signifikansi 0,044 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka, penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bone. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Femi Bago (2013) variabel Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki koefisien regresi (beta) sebesar 0,609 dengan arah koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan

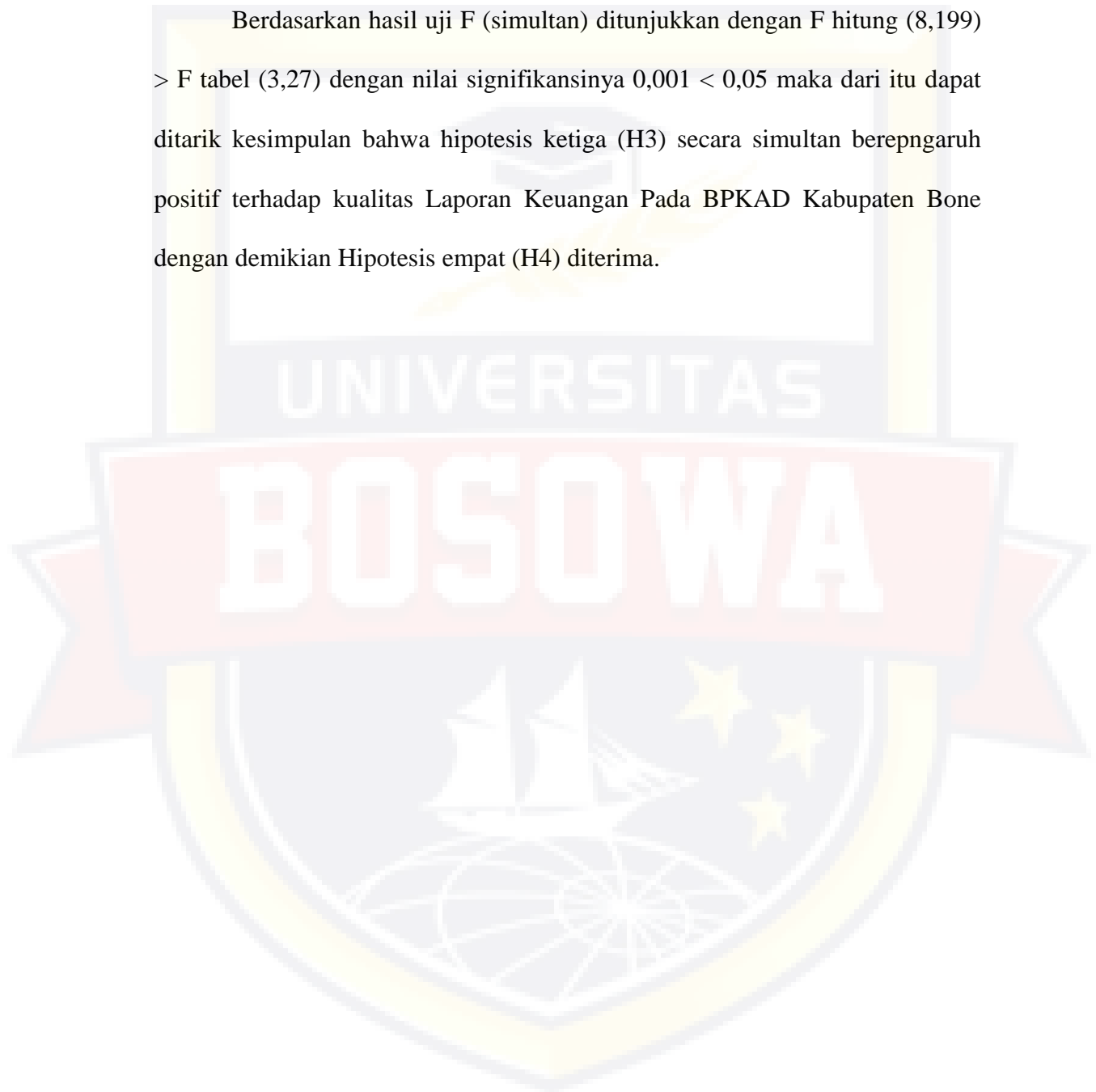
Keuangan Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah.

3. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Bone.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3) bahwa terdapat Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah terhadap laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone. Dari hasil regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien regresi Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,39, nilai koefisien regresi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah sebesar 0,273 dan nilai konstanta sebesar 11,259. Dengan demikian persamaan regresi linear berganda yakni $Y = 11,259 + 0,39X_1 + 0,273X_2$. Artinya, jika X_1 mengalami perubahan, maka Y akan tetap sebesar 11,259 sehingga Kapasitas Sumber Daya Manusia sebesar 0,39, nilai koefisien regresi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah. Artinya, jika X_1 dan X_2 dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka Y akan tetap sebesar 11,259 sehingga Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone. Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,319 atau 31,9% yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone dapat dijelaskan oleh variabel Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem

Informasi Administrasi Keuangan Daerah dan 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan oleh penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji F (simultan) ditunjukkan dengan F hitung (8,199) > F tabel (3,27) dengan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$ maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga (H3) secara simultan berepngaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Kabupaten Bone dengan demikian Hipotesis empat (H4) diterima.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil perhitungan olah data SPSS diperoleh bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPKAD Kab. Bone. Dari hasil perhitungan diperoleh $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan $\text{sig-t} < 0,05$. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone diterima.
- b. Berdasarkan hasil perhitungan olah data SPSS diperoleh bahwa variabel penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan BPKAD Kab. Bone. Dari hasil perhitungan diperoleh $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dengan $\text{sig-t} < 0,05$. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone diterima.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan analisis linier berganda diperoleh bahwa variabel Kapasitas Sumber daya manusia dan Penerapan sistem informasi administrasi keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada BPKAD Kab. Bone.

Koefisien determinasi menunjukkan angka sebesar 0,319 atau 31,9% yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan pada BPKAD kabupaten Bone dapat dijelaskan oleh variabel Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah sisanya 68,1% artinya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) memiliki tingkat pengaruh yang lemah. Maka dari itu. Hipotesis tiga menyatakan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA) secara bersama sama berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

- a. Sebaiknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bone memberikan pelatihan pelatihan khususnya pelatihan terhadap Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah.
- b. Sebaiknya dalam penyajian laporan keuangan diharapkan dapat mengikuti Standar kualitas laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Alimbudiono, R., Sandra, dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan sumber daya manusia sub bagian akuntansi pemerintah daerah XYZ dan kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah kepada masyarakat: renungan bagi akuntan pendidik*. *Jurnal Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05, No. 02
- Andrianto, Elvin. 2017. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. “Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta.
- Azhar, 2007. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri NO.13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Program Pasca Sarjana USU. Medan
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat.
- Diah, Anggraeni (2015). *pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal berbasis coso dan dampaknya pada pencegahan kecurangan (studi pada pt. Kereta api indonesia (persero) bandung)*. fakultas ekonomi unpas.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 7, Penerbit Universitas Dipengoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2014, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hamzah, Ardi. 2009. “*Evaluasi Kesesuaian Model Keprilakuan dalam Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di Indonesia, Seminar Nasional Aplikasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SNSTI)*”. Yogyakarta, 20 Juni 2009

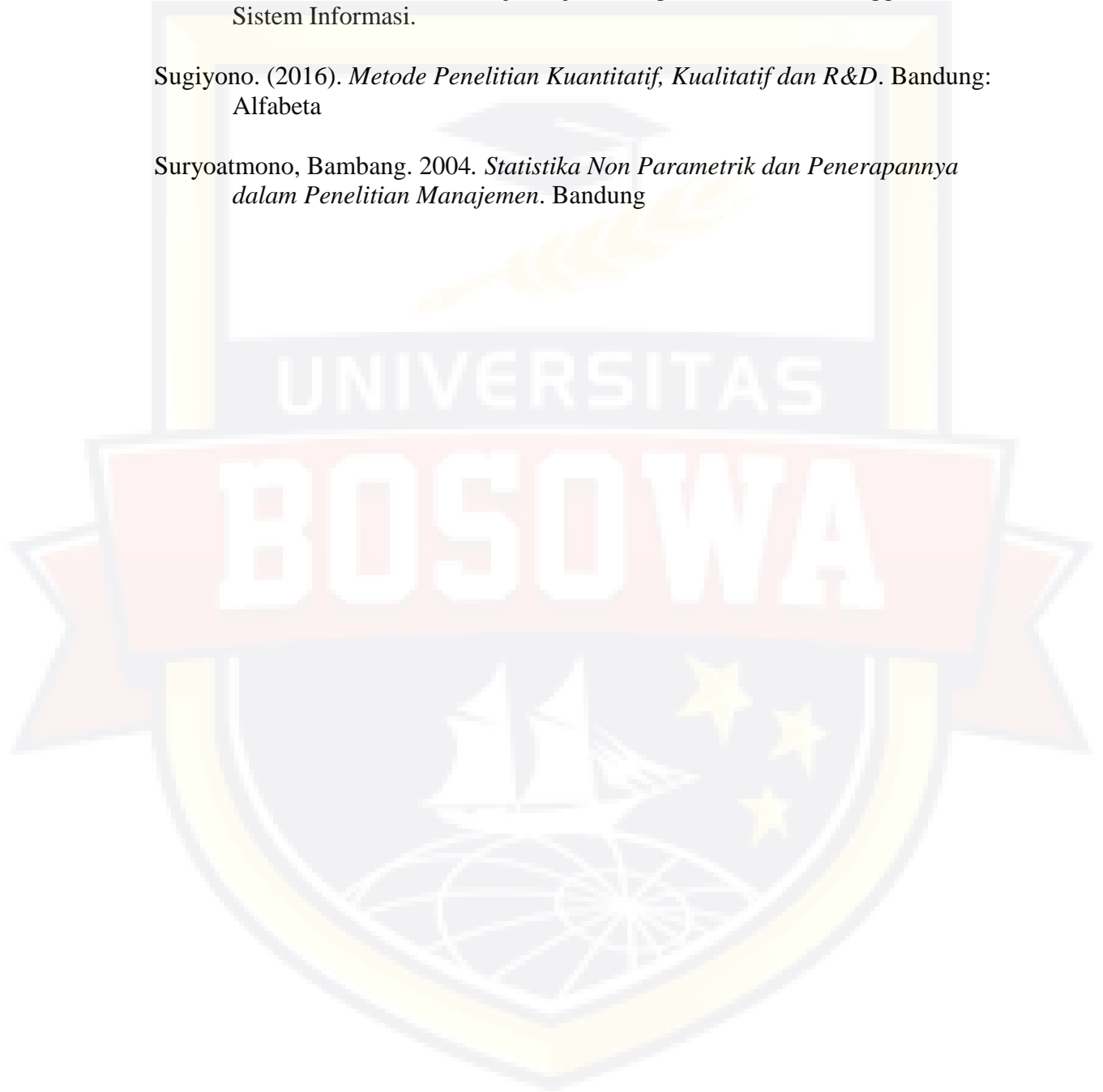
- Hengki Primayana, kadek, Anantawikrama Tungga Atmaja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Hullah, Abdurahman Rigel, Sifrid Pangemanan, Steven Tangkuman dan Novi Budiarmo. 2012. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi, Vol 3 – No 2. ISSN. 2088-8899.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Illir)*. Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XI. 23-24 Juli. Pontianak.
- Jamilah, Aprianti. 2014. “*Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan Pada Pt Intan Sengkunyt*”. Other Thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kharis, Abdul. 2010. “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada PT. Avia Avian*”. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN”.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang *pengelolaan keuangan daerah*
- Republik Indonesia. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang *pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*

Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Setiawan, A. (2017). *Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan Sistem Informasi*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryoatmono, Bambang. 2004. *Statistika Non Parametrik dan Penerapannya dalam Penelitian Manajemen*. Bandung



LAMPIRAN

LEMBAR KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut:

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : Pria Wanita

3. Umur : Tahun

4. Bidang di BPKAD : Bidang Anggaran

Bidang Akuntansi

Bidang Perbendaharaan

5. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2

Lain-lain (.....)

6. Latar Belakang Pendidikan : Akuntansi Manajemen Pertanian MIPA

Lain-lain (.....)

7. Masa Kerja di BPKAD : < 1th 1-5th >5th

B. DAFTAR PERNYATAAN

BAGIAN 1 : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju SS : Sangat Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	Relevan				
1.	Instansi tempat saya bekerja dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu.				
2.	Instansi tempat saya bekerja dapat menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan jelas.				
	Andal				
3.	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan disajikan secara jujur sesuai dengan transaksi yang dilakukan.				
4.	Instansi tempat saya bekerja menghasilkan informasi keuangan yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.				
5.	Instansi tempat saya bekerja menghasilkan laporan keuangan yang bertujuan untuk kebutuhan umum bukan untuk kepentingan sepihak.				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Dapat dibandingkan					
6.	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.				
7.	Dalam penyusunan laporan keuangan, instansi tempat saya bekerja telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun				
Dapat dipahami					
8.	Laporan yang dibuat oleh instansi tempat saya bekerja disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.				
9.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas serta istilah yang digunakan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.				



BAGIAN 2 : Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Latar Belakang Pendidikan					
1.	Saya berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi				
Pelatihan					
2.	Selama bekerja di instansi ini Saya telah mendapatkan pelatihan untuk dapat menunjang kemampuan bekerja saya di instansi ini.				
3.	Saya memahami materi pelatihan yang Diberikan terkait pengelolaan keuangan.				
4.	Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan.				
Pengalaman					
5.	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang saya tempati				
6.	Saya sudah berpengalaman pada bidang ini, sehingga dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja.				
Etika / attitude					
7.	Saya menjalankan seluruh tugas saya dengan jujur sesuai dengan data yang disajikan.				
8.	Saya menjalankan tugas saya sesuai dengan aturan yang berlaku.				
9.	Saya bekerja berdasarkan data yang disajikan tanpa mementingkan kepentingan sepihak.				

BAGIAN 3 : Sistem Informasi Administrasi Keuangan Daerah (SIKUDA)

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat dari Bapak/Ibu.

STS : Sangat Tidak Setuju TS : Tidak Setuju
S : Setuju SS : Sangat Setuju

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Akurat					
1.	Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi ini bersifat akurat sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipercaya.				
2.	Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi ini bebas dari kesalahan kesalahan yang dapat menyesatkan atau merusak laporan keuangan yang dihasilkan.				
Relevan					
3.	Informasi yang dihasilkan bermanfaat bagi para pengguna yang membutuhkan				
4.	Informasi yang disajikan mendukung proses kinerja laporan keuangan daerah di instansi ini.				
5.	Sistem Informasi ini menghasilkan informasi yang dapat dipahami dengan jelas.				
Tepat Waktu					
6.	Informasi yang dihasilkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan				
7.	Informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pada suatu periode tertentu				
Lengkap					
8.	Sistem informasi ini menghasilkan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengguna.				
9.	Sistem informasi ini menyajikan data-data secara lengkap dan detail.				

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	Kualitas LKPD									Total y
	y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	
1	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	27
4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	31
5	3	3	4	3	4	3	4	4	4	32
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32
8	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32
9	4	4	3	3	4	3	3	4	3	31
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	3	3	3	3	3	3	3	4	3	28
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	4	4	3	2	4	3	3	3	4	30
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
15	4	4	4	3	4	3	4	4	4	34
16	3	3	3	3	3	4	3	4	3	29
17	3	3	4	4	4	3	3	4	4	32
18	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
19	4	4	3	4	4	3	3	4	4	33
20	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
21	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
22	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
24	4	4	4	3	4	3	3	4	3	32
25	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	4	4	4	3	3	3	3	3	3	30
28	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
29	3	3	4	4	4	3	4	4	3	32
30	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
33	4	4	3	3	3	3	3	3	3	29
34	4	3	4	4	3	3	3	4	3	31
35	3	3	4	4	3	3	4	3	3	30
36	3	3	4	3	3	3	4	3	3	29
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

PERBENDAHARAAN

AKUNTANSI

ANGGARAN

NO	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA									total_x1
	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
3	2	3	3	3	3	3	4	4	4	29
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
5	3	3	3	3	3	3	3	3	2	26
6	3	3	3	3	4	4	4	4	4	32
7	4	3	3	3	3	3	4	4	4	31
8	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
9	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
10	2	3	3	3	3	3	4	4	4	29
11	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
12	3	2	2	2	3	3	3	3	3	24
13	2	2	3	4	4	4	3	4	3	29
14	4	4	4	3	4	3	3	3	3	31
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
16	4	3	3	3	4	3	4	4	3	31
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
18	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
19	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
20	2	3	3	3	3	3	4	4	4	29
21	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
22	4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
23	3	3	3	3	4	4	3	4	3	30
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
28	2	2	2	3	3	3	3	3	3	24
29	3	4	3	3	4	3	4	4	3	31
30	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	28
34	3	3	3	3	3	3	4	4	4	30
35	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34
36	2	3	3	3	3	3	4	4	4	29
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
38	2	4	4	4	4	4	4	4	4	34

PERBENDAHARAAN

AKUNTANSI

ANGGARAN

NO	SIAKUDA									total_x2
	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	
1	3	2	3	3	3	3	2	3	3	25
2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	25
3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3	31
8	2	3	3	2	3	3	4	3	3	26
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
10	4	3	3	3	3	3	3	3	3	28
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
14	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
18	4	3	4	4	3	2	3	3	3	29
19	4	3	4	4	3	2	3	3	3	29
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	4	3	4	4	3	2	3	3	3	29
22	4	3	4	4	3	2	3	3	3	29
23	3	3	3	3	2	2	2	3	2	23
24	3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
25	3	2	3	3	3	3	3	3	2	25
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
28	3	3	3	3	3	4	2	3	4	28
29	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
33	3	3	3	2	2	3	2	3	3	24
34	3	3	3	3	3	3	3	4	4	29
35	4	3	3	4	4	4	3	4	4	33
36	3	3	4	4	3	3	4	4	4	32
37	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

PERBENDAHARAAN

AKUNTANSI

ANGGARAN

HASIL SPSS

A.FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN

Statistics

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9
N	Valid	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		2.89	3.08	3.08	3.21	3.37	3.16	3.50	3.55	3.45
Std. Deviation		.727	.487	.428	.474	.489	.370	.507	.504	.555
Variance		.529	.237	.183	.225	.239	.137	.257	.254	.308
Range		2	2	2	2	1	1	1	1	2
Minimum		2	2	2	2	3	3	3	3	2
Maximum		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sum		110	117	117	122	128	120	133	135	131

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	12	31.6	31.6	31.6
	S	18	47.4	47.4	78.9
	SS	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	7.9	7.9	7.9
	S	29	76.3	76.3	84.2
	SS	6	15.8	15.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5.3	5.3	5.3
	S	31	81.6	81.6	86.8
	SS	5	13.2	13.2	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.6	2.6	2.6
	S	28	73.7	73.7	76.3
	SS	9	23.7	23.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	24	63.2	63.2	63.2
	SS	14	36.8	36.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	32	84.2	84.2	84.2
	SS	6	15.8	15.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	19	50.0	50.0	50.0
	SS	19	50.0	50.0	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	17	44.7	44.7	44.7

SS	21	55.3	55.3	100.0
Total	38	100.0	100.0	

x1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.6	2.6	2.6
	S	19	50.0	50.0	52.6
	SS	18	47.4	47.4	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Statistics

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9
N	Valid	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.26	2.95	3.29	3.26	3.13	3.00	3.05	3.24	3.21
Sum		124	112	125	124	119	114	116	123	122

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.6	2.6	2.6
	S	26	68.4	68.4	71.1
	SS	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	13.2	13.2	13.2
	S	30	78.9	78.9	92.1
	SS	3	7.9	7.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	27	71.1	71.1	71.1
	SS	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5.3	5.3	5.3
	S	24	63.2	63.2	68.4
	SS	12	31.6	31.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5.3	5.3	5.3
	S	29	76.3	76.3	81.6
	SS	7	18.4	18.4	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	13.2	13.2	13.2
	S	28	73.7	73.7	86.8
	SS	5	13.2	13.2	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	5	13.2	13.2	13.2
	S	26	68.4	68.4	81.6
	SS	7	18.4	18.4	100.0

Total	38	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

x2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	29	76.3	76.3	76.3
	SS	9	23.7	23.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

x2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5.3	5.3	5.3
	S	26	68.4	68.4	73.7
	SS	10	26.3	26.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Statistics

		y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9
N	Valid	38	38	38	38	38	38	38	38	38
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.53	3.53	3.45	3.24	3.50	3.18	3.26	3.45	3.29
Sum		134	134	131	123	133	121	124	131	125

y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	18	47.4	47.4	47.4
	SS	20	52.6	52.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	18	47.4	47.4	47.4

SS	20	52.6	52.6	100.0
Total	38	100.0	100.0	

y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	55.3	55.3	55.3
	SS	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	2	5.3	5.3	5.3
	S	25	65.8	65.8	71.1
	SS	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	19	50.0	50.0	50.0
	SS	19	50.0	50.0	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	31	81.6	81.6	81.6
	SS	7	18.4	18.4	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.6	2.6	2.6
	S	26	68.4	68.4	71.1
	SS	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	21	55.3	55.3	55.3
	SS	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	27	71.1	71.1	71.1
	SS	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

B. UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS

- Kapasitas Sumber Daya Manusia

		Correlations									
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	x1.7	x1.8	x1.9	total_x1
x1.1	Pearson Correlation	1	.177	.114	.223	.416**	-.238	.220	.163	.120	.443**
	Sig. (2-tailed)		.288	.494	.179	.009	.150	.185	.328	.474	.005
	N	38	38	38	38	3	38	38	38	38	38
x1.2	Pearson Correlation	.177	1	.879**	.395*	.442**	.229	.384*	.258	.266	.644**
	Sig. (2-tailed)	.288		.000	.014	.005	.166	.017	.118	.107	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.3	Pearson Correlation	.114	.879**	1	.583**	.504**	.432**	.312	.294	.303	.691**
	Sig. (2-tailed)	.494	.000		.000	.001	.007	.057	.073	.065	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.4	Pearson Correlation	.223	.395*	.583**	1	.706**	.422**	.450**	.518**	.454**	.765**
	Sig. (2-tailed)	.179	.014	.000		.000	.008	.005	.001	.004	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.5	Pearson Correlation	.416**	.442**	.504**	.706**	1	.567**	.436**	.577**	.273	.802**
	Sig. (2-tailed)	.009	.005	.001	.000		.000	.006	.000	.098	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.6	Pearson Correlation	-.238	.229	.432**	.422**	.567**	1	.144	.390*	.173	.441**
	Sig. (2-tailed)	.150	.166	.007	.008	.000		.387	.016	.298	.006
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.7	Pearson Correlation	.220	.384*	.312	.450**	.436**	.144	1	.900**	.817**	.783**
	Sig. (2-tailed)	.185	.017	.057	.005	.006	.387		.000	.000	.000

	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.8	Pearson Correlation	.163	.258	.294	.518**	.577**	.390*	.900**	1	.735**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.328	.118	.073	.001	.000	.016	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x1.9	Pearson Correlation	.120	.266	.303	.454**	.273	.173	.817**	.735**	1	.692**
	Sig. (2-tailed)	.474	.107	.065	.004	.098	.298	.000	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
total_x1	Pearson Correlation	.443**	.644**	.691**	.765**	.802**	.441**	.783**	.795**	.692**	1
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000	.000	.000	.006	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- **PENERAPAN SIAKUDA**

		Correlations									
		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.7	x2.8	x2.9	total_x2
x2.1	Pearson Correlation	1	.410*	.713**	.811**	.530**	-.103	.234	.328	.294	.644**
	Sig. (2-tailed)		.011	.000	.000	.001	.537	.157	.044	.073	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.2	Pearson Correlation	.410*	1	.456**	.372*	.402*	.225	.527**	.472**	.490**	.660**
	Sig. (2-tailed)	.011		.004	.021	.012	.174	.001	.003	.002	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.3	Pearson Correlation	.713**	.456**	1	.860**	.564**	-.113	.562**	.463**	.410*	.752**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004		.000	.000	.499	.000	.003	.011	.000

	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.4	Pearson Correlation	.811**	.372*	.860**	1	.686**	.000	.471**	.524**	.452**	.794**
	Sig. (2-tailed)	.000	.021	.000		.000	1.000	.003	.001	.004	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.5	Pearson Correlation	.530**	.402*	.564**	.686**	1	.547**	.676**	.636**	.641**	.874**
	Sig. (2-tailed)	.001	.012	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.6	Pearson Correlation	-.103	.225	-.113	.000	.547**	1	.275	.483**	.591**	.447**
	Sig. (2-tailed)	.537	.174	.499	1.000	.000		.095	.002	.000	.005
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.7	Pearson Correlation	.234	.527**	.562**	.471**	.676**	.275	1	.611**	.504**	.749**
	Sig. (2-tailed)	.157	.001	.000	.003	.000	.095		.000	.001	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.8	Pearson Correlation	.328*	.472**	.463**	.524**	.636**	.483**	.611**	1	.844**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.044	.003	.003	.001	.000	.002	.000		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
x2.9	Pearson Correlation	.294	.490**	.410*	.452**	.641**	.591**	.504**	.844**	1	.798**
	Sig. (2-tailed)	.073	.002	.011	.004	.000	.000	.001	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
total_x2	Pearson Correlation	.644**	.660**	.752**	.794**	.874**	.447**	.749**	.817**	.798**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- **KUALITAS LKPD**

Correlations

		y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	total_y
y.1	Pearson Correlation	1	.894**	.324*	.223	.632**	.315	.184	.324*	.373*	.720**
	Sig. (2-tailed)		.000	.048	.178	.000	.054	.268	.048	.021	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.2	Pearson Correlation	.894**	1	.218	.124	.632**	.315	.078	.218	.373*	.647**
	Sig. (2-tailed)	.000		.189	.456	.000	.054	.641	.189	.021	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.3	Pearson Correlation	.324*	.218	1	.591**	.476**	-.018	.482**	.574**	.476**	.709**
	Sig. (2-tailed)	.048	.189		.000	.003	.915	.002	.000	.003	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.4	Pearson Correlation	.223	.124	.591**	1	.344*	.043	.261	.591**	.368*	.615**
	Sig. (2-tailed)	.178	.456	.000		.034	.796	.114	.000	.023	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.5	Pearson Correlation	.632**	.632**	.476**	.344*	1	.339*	.424**	.582**	.638**	.853**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.034		.037	.008	.000	.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.6	Pearson Correlation	.315	.315	-.018	.043	.339*	1	.432**	.119	-.004	.399*
	Sig. (2-tailed)	.054	.054	.915	.796	.037		.007	.478	.981	.013
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.7	Pearson Correlation	.184	.078	.482**	.261	.424**	.432**	1	.269	.246	.563**

	Sig. (2-tailed)	.268	.641	.002	.114	.008	.007		.102	.136	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.8	Pearson Correlation	.324*	.218	.574**	.591**	.582**	.119	.269	1	.593**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.048	.189	.000	.000	.000	.478	.102		.000	.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
y.9	Pearson Correlation	.373*	.373*	.476**	.368*	.638**	-.004	.246	.593**	1	.688**
	Sig. (2-tailed)	.021	.021	.003	.023	.000	.981	.136	.000		.000
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
total_y	Pearson Correlation	.720**	.647**	.709**	.615**	.853**	.399*	.563**	.727**	.688**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.013	.000	.000	.000	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliabilitas

- **Kapasitas sdm**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.762	10

- **Penerapan Siakuda**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.774	10

- **Kualitas LKPD**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

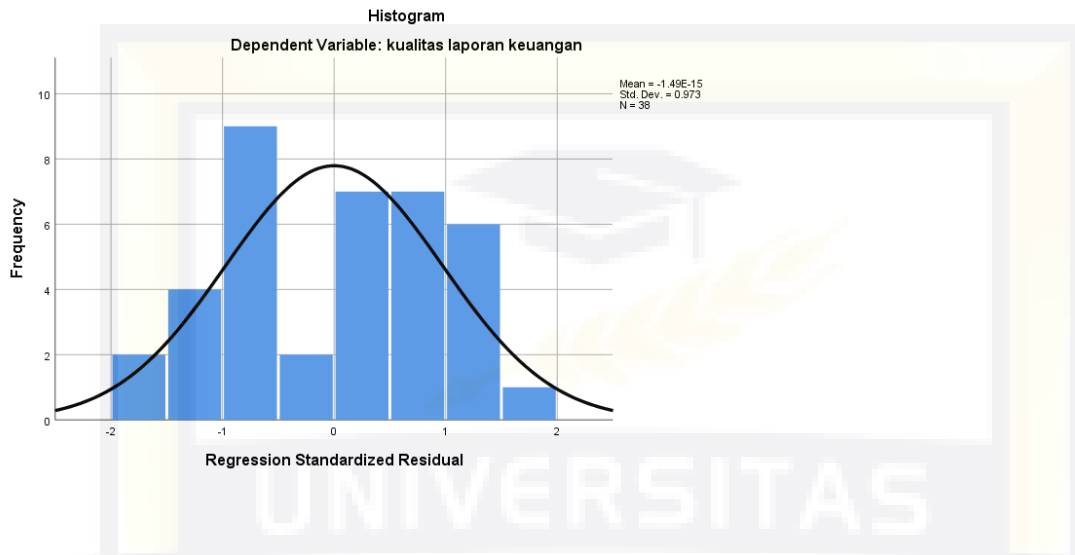
Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.744	12

C. UJI ASUMSI KLASIK

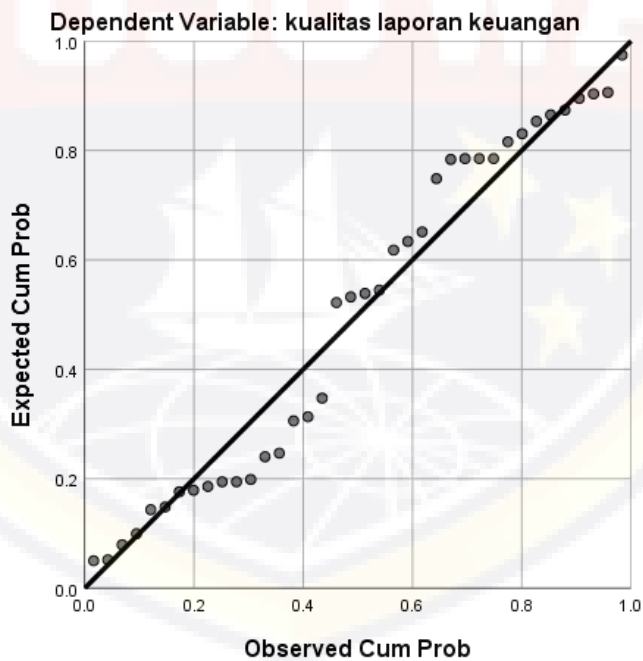
a. uji normalitas

histogram



Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Kolomograv

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.42399126
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.128
	Negative	-.132
Test Statistic		.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.092 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

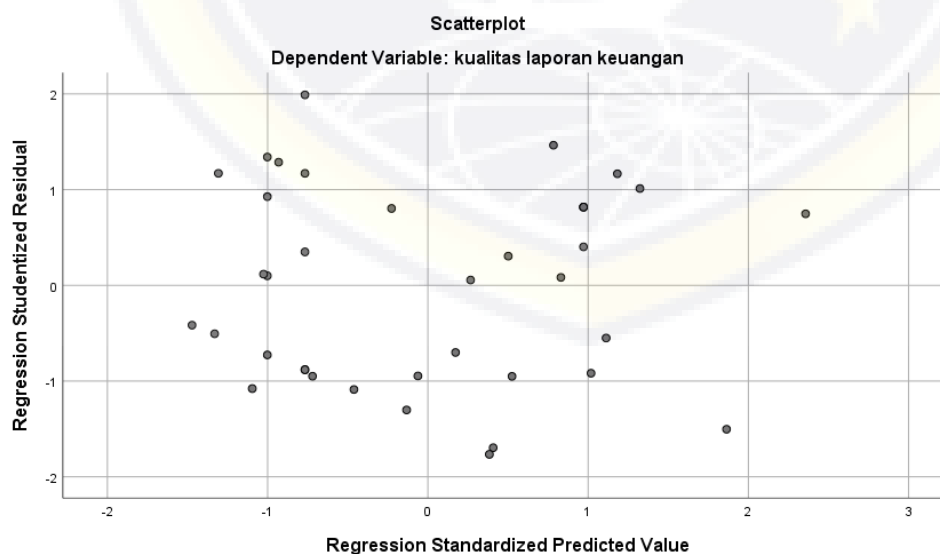
b. uji multikolineritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.259	4.753		2.369	.023		
	kapasitas SDM	.390	.140	.402	2.776	.009	.927	1.079
	penerapan siakuda	.273	.131	.303	2.090	.044	.927	1.079

- a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

c. uji heterokedasitas



D.UJI HIPOTESIS

a. uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.259	4.753		2.369	.023		
	kapasitas SDM	.390	.140	.402	2.776	.009	.927	1.079
	penerapan siakuda	.273	.131	.303	2.090	.044	.927	1.079

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

b. uji f

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	101.861	2	50.931	8.199	.001 ^b
	Residual	217.402	35	6.211		
	Total	319.263	37			



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. H. A. Mappayukki No. Watampone Provinsi Sulawesi Selatan

Telp. 0481-2293 Fax. 0481-22593 Kode Pos 92733

Email. bpkadbone@yahoo.com / Website. bpkad.bone.go.id

Nomor : 900/305/III/BKAD/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Watampone, 16 Maret 2021
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
di-
Makassar

Berdasarkan Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP Nomor :
070/12.150/III/IP/DPMPTSP/2021 . Tanggal, 05 Maret 2021.

Nama : EKA PUTRI WULANDARI
Nim : 45 17 013 065
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi UNIBOS Makassar
Alamat : BTN Pebabri Blok 1/8 Kel. Masumpu Kec. Tanete
Riattang

Maksud dan Tujuan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan
judul :

**“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE ”**

Kami bersedia menerima meneliti dikantor Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bone, dengan ketentuan bersedia melaksanakan dan mentaati semua
peraturan yang ada, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penelitian
pada instansi kami.

Demikian di sampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kab. Bone


H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
Nip : 19631007 198611 1 002